

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyansyah, A. M. (2013). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin). <https://core.ac.uk/download/pdf/25493581.pdf>
- Behn, RD (2003). Mengapa mengukur kinerja? Tujuan yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda pula. *Tinjauan administrasi publik*, 63 (5), 586-606.
- Chan, D., & Schmitt, N. (2002). Situational judgment and job performance. *Human Performance*, 15(3), 233-254.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Enjella, E., Rahmawati, R., & Jumiati, I. E. (2017). *Kinerja Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Dalam Menangani Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resort Serang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Humas Polres Pinrang. 2023. *Polres Pinrang*. <https://polrespinrang.com/profil-polres-pinrang/>. [Online, diakses pada 21 Desember 2023]
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 101-120.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Kabupaten Pinrang, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pinrang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pinrang). [Online, diakses pada 27 November 2023]
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KKBI. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses pada 11 Desember 2023]
- Kurniawan, A., & Lestari, T. (2010). Analisis pemanfaatan data sensus harian rawat inap untuk pelaporan indikator pelayanan rawat inap di rumah sakit umum daerah dr. Soeroto ngawi. *Rekam Medis*, 4(2).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit. Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit. Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Muliadi, S. 2012. Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 5
- POLRI. 2023. *Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)*. <https://polri.go.id/sp2hp>. [Online, diakses pada 26 Desember 2023]
- Prawirosentono, Suyadi , Primasari, Dewi. (2015). *Manajemen Sumberdaya Manusia Kinerja & Motivasi Karyawan : Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia* (Ed. Ke-3). Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*.
- Raslin, Harvin. 2021. Efektivitas penggelaran sistem elektronik manajemen penyidikan (e-mp) reskrim dalam mewujudkan pelayanan prima polri. *Jurnal Litbang Polri*. 24(1). 30-49
- Remincel. (2019). Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ensiklopedia*. 1(2). 268-273
- Ruky, Achmad, S. 2004. *Sistem Manajemen Kinerja Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Samuel Yohenson Yoce Mattews dan I Nengah suharta. (2020) Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Kerta Semaya*. 8(5). 709-721.
- Sedarmayanti, M., & Pd, M. 2001. Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. *Bandung: CV. Mandar Maju*.

- Siburian, R., Lukman, S., & Kurniawati, L. (2020). Analisis Penerapan Standar Operasional Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. *JURNAL ILMIAH EKBANK*, 3(1).
- Soesilo (R.). (1976). *Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*. Politeia.
- Sulfiani, Andi Ni'mah. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*. 17(1). 95-116
- Suliman, Abubakar M.T. 2001. Work performance: is it one thing or many things? The multidimensionality of performance in a Middle Eastern context. *International Journal of Human Resource Management*. 12(6), 1049-1061.
- Suryani, N. K., & FoEh, J. E. 2018. *Kinerja organisasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Ummah, Choiru. (2019). Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2017 Pada UPTSA Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1-21.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Wahyuni, Willa. 2022. "CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana". <https://www.hukumonline.com/berita/a/cctv-sebagai-alat-bukti-pidana-lt62872c717acdf/>. (Diakses pada 7 Januari 2024)
- Wargadinata, E. L. (2017). Kualitas Pengukuran Kinerja Organisasi Publik. *Sosiohumaniora*, 19(2), 86-94.
- Wongrassamee, S., Simmons, JE, & Gardiner, PD (2003). Alat pengukuran kinerja: Balanced Scorecard dan EFQM Excellence Model. *Mengukur keunggulan bisnis*, 7 (1), 14-29
- Yustisia, T. V. (2016). *KUHP & KUHP*. VisiMedia.

## Lampiran 1 – Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

Guna menjawab pertanyaan penelitian, maka berdasarkan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, perlu disusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Namun, dikarenakan sifatnya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka pertanyaan tersebut diformulasikan dalam bentuk pedoman wawancara berikut ini :

1. Indikator pengukuran kualitas layanan bagian Sat Reskrim Polres Pinrang
  - a. Keterbukaan informasi
    - Bagaimana kewajiban pemerintah khususnya pada Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pinrang untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan?
  - b. Kemudahan prosedur pelayanan
    - Bagaimana kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan?
2. Indikator pengukuran responsivitas bagian Sat Reskrim Polres Pinrang

- a. Ketepatan waktu
  - Se jauh mana pelaksanaan pelayanan di masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan di Sat reskrim Polres Pinrang?
3. Faktor penghambat dan pendukung pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Kepolisian Resort Pinrang
  - a. Faktor penghambat
    - Apa yang menjadi faktor penghambat atau bahkan menghalangi kinerja pelayanan publik Satreskrim Polres Pinrang dalam menyelesaikan kasus pencurian motor?
  - b. Faktor pendukung
    - Apa yang menjadi faktor pendukung atau yang memfasilitasi kinerja pelayanan publik Satreskrim Polres Pinrang sehingga dapat menyelesaikan kasus pencurian motor dengan mudah?

## Lampiran 2 – Dokumentasi Penelitian





**Wawancara dengan Masyarakat/Pelapor pencurian motor (Telah terselesaikan & mendapatkan motornya kembali )**



**Wawancara dengan Masyarakat/Pelapor pencurian motor (Telah terselesaikan & mendapatkan motornya kembali )**



**Wawancara dengan Masyarakat/Pelapor pencurian motor (Belum terselesaikan kasusnya)**



**Wawancara dengan Masyarakat/Pelapor pencurian motor (Belum terselesaikan kasusnya)**

### Lampiran 3 – Surat Keterangan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PINRANG

Jalan Bintang No. 03 Pinrang Kode Pos 91212

Pinrang, Januari 2024

Nomor : B / 10 / 1 / 2024 / Reskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan melaksanakan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FISIP UNHAS MAKASSAR

Di\_

Makassar

Dengan hormat,

1. Rujukan surat dari Dekan FISIP UNHAS Makassar nomor : 8403/UN4.8.1/PT.01.04/ 2023 tanggal 08 November 2023 , tentang Permohonan Izin Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / ibu, bahwa mahasiswa atas nama :  

Nama : NURUL HIDAYATUN NIKMAH  
Jenis kelamin : Perempuan  
NIM : E051201020  
Program studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Kinerja Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal dalam Menangani Kasus Pencurian Motor di Kepolisian Resor Pinrang
3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Reskrim Polres Pinrang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mempergunakan sebagaimana mestinya.





## Lampiran 4 – Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Kab. Pinrang

NO	BULAN	2018			2019			2020			2021			2022			2023							
		UNIT			UNIT			UNIT			UNIT			UNIT			UNIT							
		R2	R4	JML	R2	R4	JML	R2	R4	JML	R2	R4	JML	R2	R4	JML	R2	R4	JML					
1	JANUARI	5.847	1.035	6.882	6.186	1.172	7.358	6.92	5.343	1.215	6.558	-10,87	4.534	1.170	5.704	-13,02	4.545	1.116	5.661	-0,75	5.698	1.556	7.254	28,14
2	FEBRUARI	4.475	897	5.372	4.816	1.036	5.852	8,94	4.332	1.046	5.378	-8,10	3.997	1.040	5.037	-6,34	3.888	1.016	4.904	-2,64	4.592	1.246	5.838	19,05
3	MARET	4.781	975	5.756	4.975	1.030	6.005	4,33	4.170	1.032	5.202	-13,37	4.255	1.204	5.459	4,94	4.491	1.293	5.784	5,95	4.540	1.359	5.899	1,99
4	APRIL	5.760	1.090	6.850	5.419	1.076	6.495	-5,18	3.338	767	4.105	-86,80	4.292	1.059	5.351	30,35	4.032	1.107	5.139	-3,96	3.929	1.139	5.068	-1,38
5	MAY	6.216	1.143	7.359	6.424	1.185	7.609	-3,18	4.266	816	5.082	-33,21	5.062	1.135	6.197	21,94	5.310	1.160	6.470	4,41	6.423	1.547	7.970	23,18
6	JUNI	5.886	878	6.764	6.272	1.099	7.371	8,97	7.253	1.349	8.602	16,70	8.207	1.798	10.005	16,31	5.928	1.378	7.306	-26,98	5.759	1.292	7.051	-3,49
7	JULI	7.416	1.319	8.735	6.790	1.347	8.137	-6,55	5.939	1.234	7.173	-11,85	5.273	1.266	6.539	-8,84	5.466	1.388	6.854	4,82	6.273	1.546	7.819	14,08
8	AGUSTUS	6.333	1.098	7.431	6.193	1.267	7.460	8,817	6.183	1.359	7.542	-14,46	5.547	1.992	7.539	-15,52	6.121	1.566	7.687	14,80	5.668	1.488	7.156	-6,91
9	SEPTEMBER	6.320	1.152	7.472	7.467	1.350	8.817	18,00	5.496	2.430	7.926	6,25	5.429	1.267	6.696	-15,52	5.932	1.488	7.420	-1,58	0	0	0	-100,00
10	OKTOBER	7.285	1.275	8.560	7.058	1.373	8.431	-1,51	5.518	1.226	6.744	-20,01	5.310	1.266	6.576	-2,49	6.138	1.520	7.658	16,45	0	0	0	-100,00
11	NOVEMBER	7.259	1.319	8.578	6.528	1.374	7.902	-7,88	6.849	1.549	8.398	6,28	7.091	1.576	8.667	3,20	6.625	1.630	8.255	-4,75	0	0	0	-100,00
12	DESEMBER	8.174	1.708	9.882	6.877	1.688	8.565	-13,33	6.582	1.726	8.308	-3,00	7.941	2.406	10.347	24,54	6.865	2.093	8.958	-13,42	0	0	0	-100,00
	TOTAL	76.252	13.889	90.141	75.005	14.997	90.002	-0,15	65.269	15.749	81.018	-9,98	66.938	17.179	84.117	3,83	65.341	16.755	82.096	-2,40	42.882	11.173	54.055	-34,16

JUMLAH UNIT KENDARAAN

PADA UPT PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PINRANG  
(TAHUN 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023)

Lampiran 5 – Daerah Rawan Kriminalitas Kab. Pinrang

